



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**



RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Rasa syukur Kami panjatkan ke hadirat Illahi Robbi yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah tahun 2025 telah selesai disusun.

Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025 disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disajikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Daerah ini mengacu pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dan dijabarkan dalam satu periode, yaitu tahun 2025 secara sistematis.

Dengan selesainya Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 diharapkan adanya masukan, kritik serta saran yang membangun untuk perbaikan kinerja pengawasan Inspektorat Daerah di masa yang datang.

Singaparna, 29 Juli 2024

INSPEKTUR DAERAH



H. AGUS BAHTIAR, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19660211 199202 1 001

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.3.1. Maksud.....	8
1.3.2. Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI HASIL RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU.....	11
2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Tasikmalaya	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah	27
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah.....	30
2.4 Reviu terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025.....	31
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	40
BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA	41
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	41
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah	43
3.2.1 Tujuan	43
3.2.2 Sasaran	44
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH	47
BAB V PENUTUP	61

DAFTAR TABEL

	Hal.
2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Tasikmalaya	12
2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.....	28
2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Tasikmalaya.....	31
3.1 Prioritas dan Sasaran Inspektorat Daerah.....	44
3.2 Tujuan Inspektorat Daerah.....	45
3.3 Sasaran Inspektorat Daerah.....	45
4.1 Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.....	46
4.2 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Tasikmalaya.	54

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
1.1 Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.....	4
1.2 Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD.....	4



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan visi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, yaitu “DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”, serta mewujudkan misi ke-2 Kabupaten Tasikmalaya seperti yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 “Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan profesional” maka diperlukan perencanaan yang baik untuk pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, profesional dan penuh tanggung jawab. Setiap Perangkat Daerah, termasuk di dalamnya Inspektorat Daerah, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing Perangkat Daerah setiap 5 (lima) tahun berupa Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap 1 (satu) tahun. Oleh karena itu, Renstra Perangkat Daerah yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya menjadi acuan utama dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjadi jembatan antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota, sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

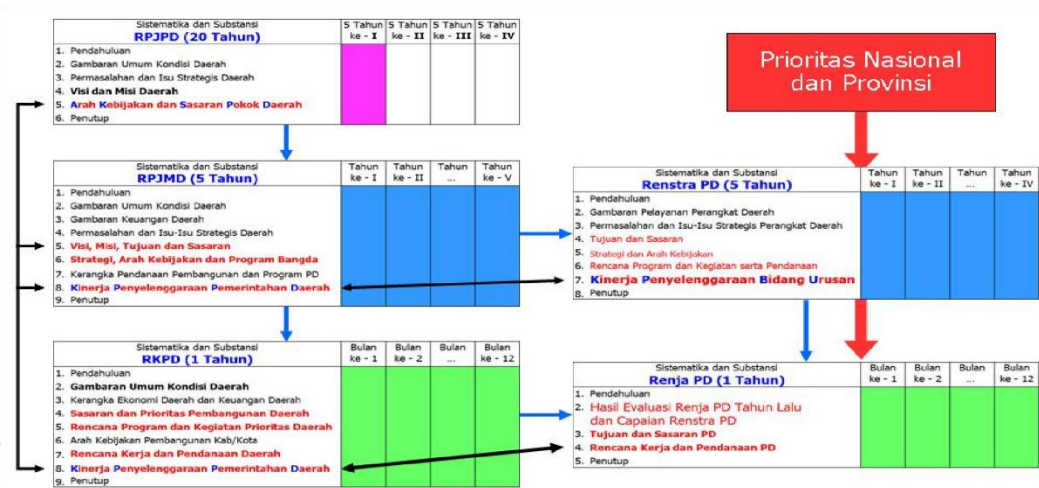
1. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah.
2. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
3. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dan rancangan awal RKPD.

4. Pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran.
5. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD.
6. Verifikasi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

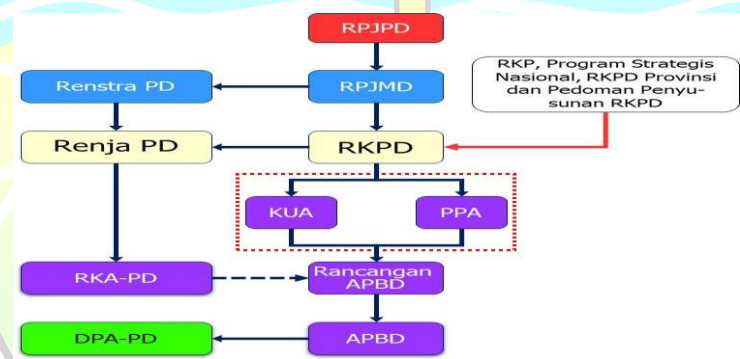
Keterkaitan Dokumen Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ditunjukkan pada 1.1 berikut ini.

GAMBAR 1.1
Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah



Sedangkan tindak lanjut dokumen Renja Perangkat Daerah hingga menjadi APBD ditunjukkan pada gambar 1.2 berikut ini.

GAMBAR 1.2
Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD



Dokumen Renja Inspektorat Daerah pada dasarnya adalah dokumen perencanaan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD dengan disertai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan yang sudah dicapai oleh Inspektorat Daerah pada periode sebelumnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai lembaga pengawasan di lingkup Pemerintah Daerah. Renja Inspektorat Daerah merupakan suatu proses pemikiran strategis yang bertujuan untuk menyikapi isu-isu yang berkembang pada saat ini dan mengimplementasikannya dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang pedoman umum pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025;
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah;
25. Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

26. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025;
27. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 0006 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
28. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja, juga sebagai pedoman bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Inspektorat Daerah tahun 2025 tersebut untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 bertujuan untuk menunjukkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, juga bertujuan untuk menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Inspektorat Daerah dan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya di tahun 2025 dan sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengawasan dan laporan kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN LALU

Bab ini berisi penjelasan dan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2024), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah telah disahkan, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting mengenai penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, hasil review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Bab ini berisi hasil telaahan terhadap kebijakan nasional, uraian tujuan dan sasaran Renja serta program dan kegiatan prioritas yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) sesuai bidang urusan Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 dilihat dari pencapaian target Renja Inspektorat Daerah berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Renja tahun 2023. Pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 meliputi Urusan Wajib Pemerintahan Umum yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah yang diimplementasikan terhadap 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan dengan jumlah pagu anggaran murni sebesar **Rp.16.662.622.761,00** yang terdiri dari belanja operasi berupa belanja pegawai serta belanja barang dan jasa sebesar Rp.16.647.522.761,00 (99,90%), dan belanja modal sebesar Rp. 15.100.000,00 (0,10%). Pada anggaran perubahan tahun 2023 pagu anggaran tersebut mengalami perubahan menjadi **Rp.17.415.622.761,00** (penambahan pagu anggaran sebesar (04,51%), yang terdiri atas belanja operasi berupa belanja pegawai serta belanja barang dan jasa sebesar Rp.17.385.522.761,00 (99,82%), dan belanja modal sebesar Rp. 30.100.000,00 (0,18%).

Hasil pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun 2023 dan perkiraan capaiannya di Tahun 2024 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.1 berikut ini.

TABEL 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah s.d Tahun 2023 Kabupaten Tasikmalaya

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2021-2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM dan KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN (2023)	
											TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
							Indikator	Satuan								
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Nilai Evaluasi SAKIP	Poin	74	79.46	73	80	109.59%	73,5	80	107.38%
							Nilai IKM	Poin	82.5	82.31	81,5	82.53	101.26%	82	82.53	99.43%
6	1	1	2.01			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	111	25	20	20	100%	20	146	131,53%
6	1	1	2.01	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	16	3	3	3	100%	3	10	62.50%
6	1	1	2.01	7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	95	22	17	22	100%	17	56	58.95%

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2021-2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM dan KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN (2023)	
											TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
6	1	1	2.02			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungja-waban keuangan yang sesuai aturan	Persen	500	100	100	89.06	89.06%	100	300	60.00%
6	1	1	2.02	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	3840	768	768	684	89.06%	768	2304	60.00%
6	1	1	2.05			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN	Persen	500	61	100	83.33	83.33%	100	249.33	49.87%
6	1	1	2.05	9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	300	13	30	20	66.67%	30	95	31.67%
6	1	1	2.05	11		Bimtek Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	300	60	60	60	100%	60	180	60.00%
6	1	1	2.06			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Persen	500	100	100	92.86	92.86%	100	300	60.00%

KODE						URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2021-2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM dan KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN (2023)	
													TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
									Indikator	Satuan								
6	1	1	2.06	2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	60	12	12	12	100%	12	37	61.67%
6	1	1	2.06	4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	60	12	12	12	100%	12	36	60.00%
6	1	1	2.06	5				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	60	12	12	12	100%	12	25	41.67%
6	1	1	2.06	6				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60	12	12	12	100%	12	36	60.00%
6	1	1	2.06	8				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60	12	12	12	100%	12	36	60.00%
6	1	1	2.06	9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	12	12	12	100%	12	36	60.00%

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2021-2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM dan KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN (2023)	
												TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
								Indikator		Satuan							
6	1	1	2.06	11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	5	1	2	1	50%	2	4	80.00%
6	1	1	2.07				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	Persen	500	100	100	100	100%	100	300	60.00%
6	1	1	2.07	2			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	7	0	0	0	0%	0	7	100.00%
6	1	1	2.07	6			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	116	27	0	0	0%	0	65	56.03%
6	1	1	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	500	100	100	100	100%	100	300	60.00%

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2021-2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM dan KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN (2023)	
												TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
								Indikator	Satuan								
6	1	1	2.08	2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	12	12	12	100%	12	36	60.00%
6	1	1	2.08	4			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	12	12	12	100%	14	36	60.00%
6	1	1	2.09				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tingkat Pemenuhan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	Persen	500	100	100	100	100%	100	300	60.00%
6	1	1	2.09	2			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	188	34	34	34	100%	34	102	54.26%
6	1	1	2.09	6			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	200	40	40	40	100%	40	120	60.00%

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2021-2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM dan KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN (2023)	
												TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
								Indikator	Satuan								
6	1	1	2.09	9			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kntor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	5	1	1	1	100%	1	3	60.00%
6	1	2			PROGRAM PENYELENG-GARAAN PENGAWASAN			CAKUPAN PENYELENG GARAAN PENGAWASAN	Persen	500	86	100	85	86%	100	269.48	53.90%
6	1	2	2.01			Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Cakupan Kegiatan Pengawasan Internal	Persen	500	96	96	100	100	96%	100	284.21	56.84%
6	1	2	2.01	1		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	366	81	81	85	85	100%	85	196	53.55%
6	1	2	2.01	2		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	409	88	88	99	99	100%	99	211	51.59%
6	1	2	2.01	3		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	5	1	1	1	1	100%	1	3	60.00%
6	1	2	2.01	4		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	5	1	1	1	1	100%	1	3	60.00%

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2021-2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM dan KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN (2023)	
												TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
								Indikator	Satuan								
6	1	2	2.01	5			Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	520	60	72	72	100%	105	251	48.27%
6	1	2	2.01	7			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	50	10	10	10	100%	10	30	60.00%
6	1	2	2.02				Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persen	500	75	100	70	75%	100	267	53.40%
6	1	2	2.02	1			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	50	5	5	2	40%	5	21	42.00%
6	1	2	2.02	2			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	200	40	40	40	100%	40	90	45.00%
6	1	3					PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	CAKUPAN PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH	Persen	500	100	100	100	100%	100	300	60.00%

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2021-2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM dan KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN (2023)	
								Indikator	Satuan			TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
6	1	3	2.01				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Cakupan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persen	500	100	100	100	100%	100	300	60.00%
6	1	3	2.01	1			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	25	5	5	5	100%	5	15	60.00%
6	1	3	2.01	2			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	17	3	3	3	100%	3	7	41.18%
6	1	3	2.02				Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Cakupan Pendampingan dan Asistensi	Persen	500	100	100	100	100%	100	300	60.00%
6	1	3	2.02	1			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	295	59	59	59	100%	59	177	60.00%

KODE						URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2021-2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM dan KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN (2023)	
									Indikator	Satuan			TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
6	1	3	2.02	2				Pendampingan,Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	295	59	59	59	100%	59	177	60.00%
6	1	3	2.02	3				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantansan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan da Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	30	5	6	6	100%	6	16	53.33%
6	1	3	2.02	4				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	295	0	0	0	0%	0	0	0.00%

Dalam realisasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun 2023 secara keseluruhan target kinerja tercapai sebesar 98,96% dan target anggaran keseluruhan tercapai sebesar 80,89%.

1). Realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu :

a. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp.82.500.000,00. Anggaran yang terserap hanya sebesar Rp.32.052.000,00 (38,85%) dengan capaian target kinerja terpenuhi 50%. Tingkat capaian yang sangat rendah ini disebabkan karena terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan alasan keterbatasan waktu yaitu pembuatan video kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan pagu anggaran sebesar Rp.150.000.000,00. Anggaran yang terserap hanya sebesar Rp.114.608.000,00 (76,41%) dengan capaian target kinerja terpenuhi 66,67%. Hal ini terjadi karena ketersediaan waktu pegawai dalam mengikuti pelatihan dan ketersediaan jenis pelatihan yang diselenggarakan tidak sesuai dengan tugas pokok fungsi jabatan fungsional yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya serta terdapat pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang dibiaya oleh pihak penyelenggara diklat yang dilaksanakan oleh (BPKP).

2) Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan capaian output terpenuhi 100% berupa tersusunnya dokumen Renja tahun 2023 dan Perubahan Renja tahun 2023. Pagu anggaran sub kegiatan ini pada tahun 2023 sebesar Rp.50.000.000,00 dan hanya terserap sebesar Rp.49.527.000,00 (99,05%).

b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pagu anggaran sebesar Rp.20.000.000,00 telah terserap sebesar Rp.19.946.000,00 (99,73%), dengan capaian target kinerja terpenuhi 100%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, total pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp.13.737.470.950,00, telah terserap sebesar Rp.10.554.902.591,00 (76,83%%). Kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2023 terpenuhi 100%.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan pagu anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan telah terserap sebesar Rp.150.000.000,00 (100%). Capaian target kinerja terpenuhi 100%.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran Rp.155.000.000,- telah terserap anggaran sebesar Rp.154.844.000,- (99,90%). Target penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk

mendukung kegiatan pengawasan selama tahun 2023 telah terpenuhi 100%.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, pagu anggaran sebesar Rp.96.286.000,- telah terserap sebesar Rp.96.286.000,- (100%). Target penyediaan bahan logistik kantor telah terpenuhi seluruhnya (tercapai 100%).
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan pagu anggaran sebesar Rp.96.640.000,00 telah terserap seluruhnya sebesar Rp.96.640.000,00 (100%) dengan tingkat capaian target kinerja 100%.
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 48.000.000,- telah terserap seluruhnya dengan tingkat capaian kinerja hasil 100%.
 - e. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan pagu anggaran sebesar Rp.84.000.000,00 telah terserap sebesar Rp.84.000.000,00 (100%). Target kinerja berupa laporan atas pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman untuk tamu selama 12 bulan tercapai 100%.
 - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp.300.214.000,00 hanya terserap anggaran sebesar Rp.299.782.449,00 (99,86%). Untuk capaian target kinerja (output) dari sub kegiatan ini telah terpenuhi 100% dengan terlaksananya kegiatan-kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dengan instansi-instansi terkait, baik vertikal maupun horizontal.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp.154.350.811,00 dan telah terserap anggaran sebesar Rp.153.013.911,00 (99,13%). Target kinerja tercapai 100% dengan terbayarnya seluruh tagihan jasa telepon, internet, PDAM, dan listrik selama 12 bulan.

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp.277.650.000,00 telah terserap sebesar Rp.277.650.000,00 (100%). Target kinerja berupa terbayarnya jasa tenaga administrasi kantor, tenaga kebersihan kantor, dan tenaga pengamanan kantor selama 1 tahun terpenuhi 100%.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu anggaran sebesar Rp.400.000.000,00 telah terserap sebesar Rp.398.514.800,00 (99,63%). Target kinerja berupa pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas operasional untuk 21 unit kendaraan roda dua dan 13 unit kendaraan roda empat telah terpenuhi 100%.

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp.75.000.000,00 dan telah terserap sebesar Rp.74.807.536,00 (99,74%). Target kinerja tercapai 100% dengan terpenuhinya dan terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala AC, laptop, printer, dan peralatan lainnya selama 1 tahun.

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan pagu

anggaran sebesar Rp.70.000.000,00 telah terserap anggaran sebesar Rp.70.000.000,00 (100%). Target kinerja pemeliharaan rutin/berkala untuk 1 unit gedung kantor telah terpenuhi 100%.

II. Program Penyelenggaraan Pengawasan

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- a. Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.125.000.000,00 telah terserap anggaran sebesar Rp.124.891.000,00 (99,91%). Target kinerja sub kegiatan ini telah tercapai 100%.
- b. Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.135.000.000,00, hanya terserap anggaran sebesar Rp.134.967.000,00 (99,98%). Target kinerja sub kegiatan ini telah tercapai 100%.
- c. Sub Kegiatan Review Laporan Kinerja dengan pagu anggaran sebesar Rp.50.000.000,00, hanya terserap anggaran sebesar Rp.48.928.000,00 (97,86%). Target kinerja sub kegiatan ini telah tercapai 100%.
- d. Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan dengan pagu anggaran sebesar Rp.137.957.000,00 telah terserap anggaran seluruhnya sebesar Rp.137.790.500,00 (99,88%). Target kinerja telah tercapai 100% berupa tersusunnya 1 (satu) buah dokumen laporan hasil reviu laporan keuangan.
- e. Sub Kegiatan Pengawasan Desa dengan pagu anggaran sebesar Rp.96.300.000,00, hanya terserap anggaran sebesar Rp.96.300.000,00 (100%). Target kinerja sub kegiatan ini telah tercapai 100%.
- f. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan APIP dengan pagu anggaran sebesar Rp.130.775.000,00 telah terserap anggaran sebesar Rp.111.035.440,00 (84,91%). Target sub kegiatan ini telah tercapai 100% dengan tersusunnya 10 dokumen temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

a. Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah pagu anggaran sebesar Rp.53.479.000,00 dan hanya terserap sebesar Rp.48.727.000,00 (91,11%). Target kinerja sub kegiatan ini telah tercapai 100%.

b. Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu pagu anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan hanya terserap sebesar Rp.99.955.000,00 (99,96%). Target kinerja sub kegiatan ini telah tercapai 100%.

III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

a. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dengan pagu anggaran sebesar Rp.110.000.000,00 telah terserap anggaran sebesar Rp.97.900.782,00 (89%). Target kinerja dari sub kegiatan ini telah tercapai 100%.

b. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan dengan pagu anggaran sebesar Rp.75.000.000,00 dan telah terserap anggaran sebesar Rp.65.261.000,00 (87,01%). Target sub kegiatan ini telah tercapai 100% dengan diajukannya Keputusan Bupati dan

Peraturan Bupati yang berkaitan dengan fungsi Inspektorat.

2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

- a. Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 telah terserap sebesar Rp.49.910.000,00 (99,82%). Target kinerja sub kegiatan ini telah tercapai 100%.
- b. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi dengan pagu anggaran sebesar Rp.255.000.000,00 telah terserap sebesar Rp.248.131.100,00 (97,31%). Target kinerja tercapai 100%.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan pagu anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 telah terserap sebesar Rp.149.657.475,00 (99,77%). Target kinerja sub kegiatan ini telah tercapai 100%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa serta tugas lain yang diberikan Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas maka dijabarkan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah sebagai berikut:

1. Perencanaan program pengawasan.

2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan.
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
4. Penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan.
5. Menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan Pemerintahan;
6. Menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan urusan Pemerintahan Desa;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

Untuk mengukur dan memantau kinerja dari tugas pokok Inspektorat Daerah maka diperlukan adanya indikator kinerja. Indikator kinerja dari Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Indikator:

Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP yang Selesai Ditindaklanjuti

- b. Meningkatnya Kapabilitas APIP

Indikator :

Hasil Leveling Lembaga Pengawasan

- c. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator :

Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Adapun hasil pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya

No.	Indikator Sasaran (IKU)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah : <i>Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP yang Selesai Ditindaklanjuti</i>	Persen	84%	85%	86%	87%	89,19%		86%	87%	Tingkat capaian indikator persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti adalah 100,21% bila dibandingkan dengan tahun 2022 (sudah melampaui target yang ditetapkan)
2.	Meningkatnya Kapabilitas APIP : <i>Hasil Leveling Lembaga Pengawasan</i>	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 3		Level 3	Level 4	Skor Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 adalah 3,0, berada pada level 3 (berdasarkan hasil evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023)
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah : <i>Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</i>	Poin	58	61	64	67	70,66		64	67	Persentase Tingkat Capaian Indikator Nilai Reformasi Birokrasi adalah 121,83% (Melampaui Target yang Telah Ditetapkan). Hal ini tentu tidak lepas dari komitmen Pimpinan dalam mewujudkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang optimal.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan intern Pemerintah Daerah, terdapat beberapa kendala dan hambatan yang ditemui Inspektorat Daerah baik pada tingkat kebijakan maupun teknis. Beberapa hambatan tersebut sebagai berikut:

1. SDM secara umum masih terbatas, baik kualitas maupun kuantitasnya.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pengawasan.
3. Masih banyaknya pengaduan masyarakat yang langsung ditujukan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) tanpa melalui Inspektorat Daerah serta adanya temuan pemeriksaan pada objek pemeriksaan yang berulang dan cukup sulit untuk ditindaklanjuti.
4. Belum semua SKPD menerapkan maturitas SPIP.
5. Kapabilitas APIP belum tercapai sesuai target.

Beberapa isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perencanaan program dan kegiatan tahun berikutnya adalah:

1. Meningkatkan kualitas aparat fungsional auditor dan PPUPD dengan mengikutsertakan pegawai Inspektorat Daerah dalam diklat, baik diklat substantif maupun diklat fungsional auditor/PPUPD, serta penambahan jumlah aparat fungsional auditor/PPUPD.
2. Peningkatan profesionalisme APIP dengan mengikuti diklat, PKS, dll, serta meningkatkan kerja sama dengan lembaga pengawasan lain.
3. Menambah sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang kelancaran kegiatan pengawasan, baik sarana transportasi maupun sarana elektronik dan sarana pendukung lainnya.
4. Menyediakan sistem informasi pengaduan masyarakat berbasis elektronik sebagai akselerasi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

5. Melaksanakan pendampingan maturitas SPIP pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebagai upaya meningkatkan *Good Governance* dan *Clean Government* dalam menumbuhkembangkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dan meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Inspektorat Daerah berusaha untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pemeriksaan dengan peningkatan kapabilitas APIP menjadi level 3 (*integrated*).

2.4 Reviu terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, menetapkan prioritas pembangunan daerah dan sasaran daerah pada Tahun 2025. Berdasarkan prioritas yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Inspektorat Daerah merencanakan kegiatan yang mendukung prioritas tersebut seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Tasikmalaya

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN										
	INSPEKTORAT DAERAH				20.479.143.583	INSPEKTORAT DAERAH				30.842.042.183	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA-HAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	74 Poin	17.808.445.583	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	74 Poin	25.387.544.183	
			Nilai IKM Perangkat Daerah	82,5 Persen				Nilai IKM Perangkat Daerah	82,5 Persen		
1.	Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Dokumen Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	20 Dokumen	183.100.000	Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Dokumen Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	20 Dokumen	196.800.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	146.800.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	146.800.000	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan	36.300.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan	50.000.000	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Sesuai Aturan	100 Persen	13.731.195.466	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Sesuai Aturan	100 Persen	13.731.195.467	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/ Bulan	13.731.195.466	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/ Bulan	13.731.195.467	
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN	100 Persen	704.825.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN	100 Persen	1.580.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	128 Paket	130.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	418.055.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	1.000.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	286.770.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	450.000.000	

4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100 Persen	1.550.780.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100 Persen	1.770.159.999	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap-an Kantor yang Disediakan	12 Paket	96.800.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap-an Kantor yang Disediakan	12 Paket	120.156.999	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	193.600.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	240.003.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	220.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	240.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	54.780.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	60.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	138.600.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	180.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	605.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	705.000.000	

	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	242.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	225.000.000	
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	100 Persen	292.215.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	100 Persen	4.649.141.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		0	Pengadaan Kendaraan Dinas	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Kendaraan Dinas yang Disediakan	1 Unit	1.186.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0	Pengadaan Kendaraan Dinas	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Kendaraan Dinas yang Disediakan	1 Unit	646.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	292.215.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	137 Unit dan 4 Paket	2.817.141.000	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	438.830.117	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	505.407.717	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	161.207.717	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	200.207.717	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	277.622.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	305.200.000	
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	907.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.954.840.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	605.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	650.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	121.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92 Unit	150.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	181.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	2.154.840.000	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan	100 Persen	1.605.898.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan	100 Persen	3.754.998.000	
1.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Cakupan Kegiatan Pengawasan Internal	100 Persen	1.317.698.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Cakupan Kegiatan Pengawasan Internal	100 Persen	3.466.798.000	

	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	85 Laporan	299.898.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	85 Laporan	299.898.000	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	99 Laporan	260.500.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	99 Laporan	260.500.000	
	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	60.500.000	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	80.500.000	
	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	192.500.000	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	192.500.000	
	Pengawasan Desa	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	72 Laporan	226.000.000	Pengawasan Desa	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	105 Laporan	1.780.900.000	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	10 Dokumen	278.300.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	10 Dokumen	852.500.000	
2.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan,	Cakupan Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100 Persen	288.200.000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan,	Cakupan Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100 Persen	288.200.000	

		Semua Kelurahan					Semua Kelurahan				
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani	10 Laporan	110.000.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani	10 Laporan	110.000.000	
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	40 Laporan	178.200.000	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	40 Laporan	178.200.000	
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Cakupan Pengendalian Intern Pemerintah	100 Persen	1.064.800.000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Cakupan Pengendalian Intern Pemerintah	100 Persen	1.699.500.000	
1.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Cakupan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100 Persen	448.800.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Cakupan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100 Persen	448.800.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	5 Rekomendasi	302.500.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	5 Rekomendasi	302.500.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	146.300.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	146.300.000	

2.	Pendampingan dan Asistensi	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Cakupan Pendampingan dan Asistensi	100 Persen	616.000.000	Pendampingan dan Asistensi	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Cakupan Pendampingan dan Asistensi	100 Persen	1.250.700.000	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	59 Perangkat Daerah	165.000.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	59 Perangkat Daerah	338.700.000	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	59 Perangkat Daerah	148.500.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	59 Perangkat Daerah	409.500.000	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6 Kegiatan	302.500.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	7 Kegiatan	402.500.000	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	0	0	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2 Kegiatan	100.000.000	



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tidak melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat karena tidak terdapat program dan kegiatan yang pelaksanaannya melibatkan masyarakat secara langsung. Bentuk keterlibatan masyarakat pada Inspektorat Daerah yaitu berupa penyampaian keluhan atau pengaduan mengenai pelayanan dan kinerja pemerintah daerah, sehingga Inspektorat Daerah dapat melaksanakan tindak lanjut dari pengaduan masyarakat berupa pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan khusus dan atau audit investigasi jika terdapat indikasi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.

Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya juga melaksanakan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, terutama di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, tata ruang dan permukiman, perhubungan, perizinan-perizinan, pariwisata, dan pelayanan masyarakat lainnya.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi antara dokumen perencanaan nasional dan daerah, sehingga diharapkan program dan kegiatan Inspektorat Daerah dapat diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan nasional maupun provinsi.

Terdapat 3 arah kebijakan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025, yaitu Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa, Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah, serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Selaras dengan arah kebijakan pada RKP tahun 2025, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya mengangkat beberapa isu strategis pembangunan yang mendasar di tahun 2025, yaitu :

1. Aksesibilitas dan keterjangkauan pelayanan dasar yang berkualitas
2. Reformasi birokrasi untuk pemerintahan yang baik dan efektif berbasis teknologi informasi
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan infrastruktur daerah
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
5. Pemulihan ekonomi daerah
6. Peningkatan daya saing kepariwisataan dan ekonomi kreatif berbasis komunitas

7. Memperluas jejaring kerja sama dan investasi di bidang pertanian dan kepariwisataan
8. Peningkatan daya saing produk pertanian di pasar lokal, nasional, regional, dan global
9. Penanggulangan kemiskinan
10. Penanggulangan pengangguran
11. Penurunan angka stunting, AKI dan AKB
12. Penataan kawasan ibu kota Kabupaten Tasikmalaya
13. Penyelenggaraan penanggulangan bencana

Berdasarkan pada isu-isu strategis tersebut terdapat 9 prioritas pembangunan yang akan menjadi fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2025, yaitu :

1. Peningkatan Pelayanan Pendidikan;
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting;
3. Pembangunan Infrastruktur Untuk Peningkatan Konektivitas Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi;
4. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana;
5. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem;
6. Peningkatan Infrastruktur dan Daya Saing Produk Pertanian dan Perikanan Untuk Menunjang Ketahanan Pangan;
7. Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Sektor Unggulan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;
8. Inovasi Pelayanan Publik; dan
9. Peningkatan Kemandirian Desa.

Inspektorat Daerah fokus terhadap prioritas pembangunan poin 8, yaitu Inovasi Pelayanan Publik. Dalam hal inovasi, sejak tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya mulai menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) secara online sebagai bagian dari pelaksanaan proses pengawasan. Namun hingga saat ini aplikasi tersebut belum

dipergunakan secara optimal, masih banyak pemutakhiran-pemutakhiran (*updating*) dan penyempurnaan-penyempurnaan yang terus dilakukan agar aplikasi tersebut dapat dipergunakan sepenuhnya sehingga dengan adanya aplikasi SIMWAS online ini diharapkan akan sangat mempermudah dan mempercepat proses tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

Selain itu, dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan profesional, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah

3.2.1 Tujuan

Penetapan tujuan didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi. Visi Kabupaten Tasikmalaya pada RPJMD Tahun 2021-2026 adalah **“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”**. Sedangkan misi Kabupaten Tasikmalaya yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 yang berkaitan dengan Inspektorat Daerah adalah misi ke dua yaitu *mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan profesional*.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan Kabupaten Tasikmalaya dalam RPJMD tahun 2021-2026 yang berkaitan dengan Inspektorat Daerah adalah tujuan ke-dua yaitu

meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dengan indikator tujuan berupa “Indeks Reformasi Birokrasi”. Sedangkan sasaran Kabupaten Tasikmalaya yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yang berkaitan dengan Inspektorat Daerah adalah sasaran keenam, yaitu meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan indikator sasaran “Nilai SAKIP”. Adapun tujuan Inspektorat Daerah yang telah ditetapkan dan selaras dengan sasaran RPJMD tahun 2021-2026 yaitu meningkatkan pengawasan, evaluasi dan pengukuran kinerja dengan indikator “Maturitas SPIP”. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Inspektorat Daerah akan mengetahui apa saja yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1-5 tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diupayakan dalam bentuk kuantitatif.

Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerjanya sehingga merupakan alat pemicu agar semua bagian organisasi sadar akan sesuatu yang harus dicapai.

Sasaran Inspektorat Daerah yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah

Indikator :

Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti

2. Meningkatnya kapabilitas APIP

Indikator :
Hasil leveling Lembaga Pengawasan

3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Indikator :
Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Berikut ini disajikan tabel 3.1 sebagai penjabaran dari prioritas pembangunan daerah dan sasaran daerah ke dalam prioritas dan sasaran Perangkat Daerah.

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Inspektorat Daerah

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah (Outcome)
1.	Prioritas 8 : Inovasi Pelayanan Publik	Sasaran 6 : Meningkatnya Koordinasi, Akuntabilitas, dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah	Indikator 8 : Nilai SAKIP	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah 2. Meningkatnya kapabilitas APIP 3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti 2. Hasil leveling Lembaga Pengawasan 3. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan tujuan, indikator tujuan dan target indikator tujuan pada tahun 2025, sebagaimana tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3.2
Tujuan Inspektorat Daerah

Tujuan Inspektorat Daerah	Indikator Tujuan Inspektorat Daerah	Target Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2025
Meningkatkan Pengawasan, Evaluasi dan Pengukuran Kinerja	Maturitas SPIP	3,2 (Level 3)

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di atas maka Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya menetapkan sasaran, indikator sasaran dan target indikator sasaran tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam tabel 3.3 di bawah ini:

Tabel 3.3
Sasaran Inspektorat Daerah

No.	Sasaran Inspektorat Daerah	Indikator Sasaran Inspektorat Daerah	Target Sasaran Inspektorat Daerah Tahun 2025
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti	86%
2.	Meningkatnya kapabilitas APIP	Hasil leveling Lembaga Pengawasan	Level 3
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64

Berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan, maka Inspektorat Daerah menetapkan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tabel 3.4. di bawah ini:

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Rencana kerja dan pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 ditunjukkan pada tabel 4.1 di bawah ini. Tabel ini berisi Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah), Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah, serta nilai pagu indikatif untuk tiap sumber pendanaan.

Tabel 4.1
Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2025

No	Sasaran Inspektorat Daerah	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah - Review Laporan Kinerja - Review Laporan Keuangan - Pengawasan Desa - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah - Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
2	Meningkatnya Kapabilitas APIP	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Kegiatan : 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 2. Pendampingan dan Asistensi - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

No	Sasaran Inspektorat Daerah	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Fasilitasi Kunjungan Tamu - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Rencana kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 terdiri atas 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan yang menjadi prioritas utama dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Pemerintahan Daerah di tahun 2024. Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan seluruh

program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 adalah sebesar Rp.30.842.042.183,00.

Seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan akan dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang meliputi Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa, Rumah Sakit, Puskesmas dan BUMD. Jumlah keseluruhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya.

Terdapat rumusan program/kegiatan/sub kegiatan pada Renja tahun 2025 yang pagu anggarannya tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, diantaranya:

1. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pagu awal sebesar Rp.36.300.000,00 bertambah menjadi sebesar Rp.50.000.000,00. Hal ini disebabkan karena terdapat penyusunan penyesuaian penghitungan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja perangkat tersebut.

2. Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya

Pagu awal sebesar Rp.0,00 bertambah menjadi sebesar Rp.130.000.000,00. Hal ini disebabkan karena terdapat pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya bagi pegawai inspektorat yang akan digunakan pada saat pengawasan ke lapangan atau pakaian khusus, sehingga menjadi identitas tersendiri dan menjadi pembeda antara pegawai inspektorat dengan pegawai lainnya.

3. Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pagu awal sebesar Rp. Rp.418.055.000,00 bertambah menjadi sebesar Rp.1.000.000.000,00. Hal ini disebabkan karena terdapat kegiatan pengembangan kompetensi pegawai berupa diklat dari BPKP (Sertifikasi, Teknis Substansi, MOOC, Microlearning) yang menunjang tugas pokok fungsi pegawai.

4. Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan

Pagu awal sebesar Rp.286.770.000,00 bertambah menjadi sebesar Rp.450.000.000,00. Hal ini disebabkan karena terdapat penyesuaian penghitungan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis tersebut.

5. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pagu awal sebesar Rp.286.770.000,00 bertambah menjadi sebesar Rp.120.156.999,00. Hal ini disebabkan karena terdapat penyesuaian penghitungan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor tersebut.

6. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Pagu awal sebesar Rp.193.600.000,00 bertambah menjadi sebesar Rp.240.003.000,00. Hal ini disebabkan karena terdapat penyesuaian penghitungan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penyediaan bahan logistik kantor tersebut.

7. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pagu awal sebesar Rp.220.000.000,00 bertambah menjadi sebesar Rp.240.000.000,00. Hal ini disebabkan karena terdapat penyesuaian penghitungan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersebut.

8. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Pagu awal sebesar Rp.54.780.000,00 bertambah menjadi sebesar Rp.60.000.000,00. Hal ini disebabkan karena terdapat penyesuaian penghitungan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis tersebut.

9. Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Pagu awal sebesar Rp.138.600.000,00 bertambah menjadi sebesar Rp.180.000.000,00. Hal ini disebabkan karena terdapat penyesuaian penghitungan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis tersebut.

10. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pagu awal sebesar Rp.605.000.000,00 bertambah menjadi sebesar Rp.705.000.000,00. Hal ini disebabkan karena terdapat penyesuaian penghitungan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis tersebut.

11. Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pagu awal sebesar Rp.0,00 bertambah menjadi sebesar Rp.1.832.000.000,00. Hal ini disebabkan karena terdapat kegiatan pengadaan kendaraan dinas berupa 1 mobil untuk kelancaran operasional dinas.

12. Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pagu awal sebesar Rp.0,00 bertambah menjadi sebesar Rp.1.832.000.000,00. Hal ini disebabkan karena terdapat kegiatan pengadaan kendaraan dinas berupa 1 mobil untuk kelancaran operasional dinas atau lapangan.

13. Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pagu awal sebesar Rp.292.215.000,00 bertambah menjadi sebesar Rp.2.817.141.000,00. Hal ini disebabkan karena terdapat pengadaan peratan dan mesin yang belum tersedia untuk menunjang kinerja inspektorat.

14. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pagu awal sebesar Rp.161.207.717,00 bertambah menjadi sebesar Rp.200.207.717,00. Hal ini disebabkan karena terdapat penyesuaian penghitungan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tersebut.

15. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pagu awal sebesar Rp.277.622.400,00 bertambah menjadi sebesar Rp.305.200.000,00. Hal ini disebabkan karena terdapat penyesuaian penghitungan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor tersebut.

16. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pagu awal sebesar Rp.605.000.000,00 bertambah menjadi sebesar Rp.650.000.000,00. Hal ini disebabkan karena terdapat penyesuaian penghitungan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan tersebut.

17. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pagu awal sebesar Rp.121.000.000,00 bertambah menjadi sebesar Rp.150.000.000,00. Hal ini disebabkan karena terdapat penyesuaian penghitungan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya tersebut.

18. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pagu awal sebesar Rp.181.500.000,00 bertambah menjadi sebesar Rp.2.154.840.000,00. Hal ini disebabkan karena terdapat kegiatan rehab atap dan bangunan, taman, pembangunan pagar, carport, saluran pembuangan limbah.

19. Sub kegiatan Reviu Laporan Kinerja

Pagu awal sebesar Rp.60.500.000,00 bertambah menjadi sebesar Rp.80.500.000,00. Hal ini disebabkan karena terdapat penyesuaian penghitungan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya tersebut.

20. Sub kegiatan Pengawasan Desa

Pagu awal sebesar Rp.226.000.000,00 bertambah menjadi sebesar Rp. Rp1.780.900.000,00. Hal ini disebabkan karena terdapat penambahan kegiatan berupa Sosialisasi terhadap aparat Desa, BPD dan Kecamatan terkait dengan pengawasan.

21. Sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Pagu awal sebesar Rp.278.300.000,00 bertambah menjadi sebesar Rp.852.500.000,00. Hal ini disebabkan karena terdapat penyesuaian penghitungan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP tersebut.

22. Sub kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Pagu awal sebesar Rp.165.000.000,00 bertambah menjadi sebesar Rp.338.700.000,00. Hal ini disebabkan karena terdapat penambahan kegiatan berupa Sosialisasi terhadap pegawai puskesmas dan anak sekolah.

23. Sub kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Pagu awal sebesar Rp.148.500.000,00 bertambah menjadi sebesar Rp.409.500.000,00. Hal ini disebabkan karena terdapat penambahan kegiatan berupa Sosialisasi SPI dan MCP (OPD dan

DPRD) Sosialisasi Zona Integritas, Sosialisasi SPIP, Sosialisasi Produk Hukum Inspektorat.

24. Sub kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Pagu awal sebesar Rp.302.500.000,00 bertambah menjadi sebesar Rp.402.500.000,00. Hal ini disebabkan karena terdapat penambahan kegiatan berupa Peringatan HAKORDIA.

25. Sub kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Pagu awal sebesar Rp.0,00 bertambah menjadi sebesar Rp.100.000.000,00. Hal ini disebabkan karena terdapat kegiatan Survey Penilaian Integritas yang dilaksanakan oleh KPK untuk mengukur integritas pemerintah daerah.

Sub Kegiatan yang mengalami penambahan anggaran disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 bahwa dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN.

Rumusan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Tasikmalaya

NAMA PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH										
KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
									TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PENGAWASAN							30.842.042.183		33.926.246.401
6.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			NILAI EVALUASI SAKIP PERANGKAT DAERAH		74	13.927.995.466		74,5
					NILAI IKM PERANGKAT DAERAH		82.5	11.459.548.717		83
6.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah		20 Dokumen	196.800.000		20 Dokumen
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	3 Dokumen	146.800.000	DAU	3 Dokumen
6.01				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	17 Laporan	50.000.000	DAU	17 Laporan
6.01			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Sesuai Aturan		100%	13.731.195.467		100%

6.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Daerah	64 Orang/ Bulan	13.731.195.467	DAU		64 Orang/ Bulan	15.104.315.014
6.01				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN		100%	1.580.000.000			100%	1.7380800.000
6.01				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Inspektorat Daerah	128 Paket	130.000.000	DAU		128 Paket	143.000.000
6.01				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Inspektorat Daerah	25 Orang	1.000.000.000	DAU		60 Orang	Rp1.100.000.000
6.01				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Daerah	60 Orang	450.000.000	DAU		60 Orang	495.000.000
6.01				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum		100%	1.770.159.999			100%	1.947.175.999
6.01				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Inspektorat Daerah	12 Paket	120.156.999	DAU		12 Paket	132.172.699
6.01				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Inspektorat Daerah	12 Paket	240.003.000	DAU		12 Paket	264.003.300
6.01				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Inspektorat Daerah	12 Paket	240.000.000	DAU		12 Paket	264.000.000
6.01				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Inspektorat Daerah	12 Dokumen	60.000.000	DAU		12 Dokumen	66.000.000
6.01				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat Daerah	12 laporan	180.000.000	DAU		12 laporan	198.000.000

6.01				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Daerah	12 Laporan	705.000.000	DAU		12 Laporan	775.500.000
6.01				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Inspektorat Daerah	1 Dokumen	225.000.000	DAU		1 Dokumen	247.500.000
6.01				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor		100%	4.649.141.000			100%	5.114.055.100
6.01				Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Inspektorat Daerah	1 Unit	1.186.000.000	DAU		1 Unit	1.304.600.000
6.01				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Inspektorat Daerah	1 Unit	646.000.000	DAU		1 Unit	710.600.000
6.01				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Inspektorat Daerah	13 Unit	2.817.141.000	DAU		26 Unit	3.098.855.100
6.01				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	505.407.717			100%	555.948.489
6.01				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Inspektorat Daerah	12 Laporan	200.207.717	DAU		12 Laporan	220.228.489
6.01				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Inspektorat Daerah	13 Laporan	305.200.000	DAU		14 Laporan	334.720.000

6.01			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tingkat Pemenuhan Jasa Pemeliharaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	2.954.840.000			100%	3.250.324.000
6.01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Inspektorat Daerah	21 Unit Kendaraan Roda Dua, 13 Unit Kendaraan Roda Empat	650.000.000	DAU		21 Unit Kendaraan Roda Dua, 13 pUnit Kendaraan Roda Empat	715.000.000
6.01				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Inspektorat Daerah	92 Unit	150.000.000	DAU		40 Unit	165.000.000
6.01				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Inspektorat Daerah	1 Unit	2.154.840.000	DAU		1 Unit	2.370.324.000
6.01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			CAKUPAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		100%	3.754.998.000			100%	4.130.497.800
6.01	02	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Cakupan Kegiatan Pengawasan Internal		100%	3.466.798.000			100%	3.813.477.800
6.01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	85 Laporan	299.898.000	DAU		85 Laporan	329.887.800
6.01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	99 Laporan	260.500.000	DAU		99 Laporan	286.550.000
6.01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kabupaten Tasikmalaya	1 Laporan	80.500.000	DAU		1 Laporan	88.550.000
6.01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kabupaten Tasikmalaya	1 Laporan	192.500.000	DAU		1 Laporan	211.750.000
6.01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kabupaten Tasikmalaya	105 Laporan	1.780.900.000	DAU		105 Laporan	1.958.990.000

6.01	02	2.01	0006	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kabupaten Tasikmalaya	10 Dokumen	852.500.000	DAU		10 Dokumen	937.750.000
6.01	02	2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		100%	288.200.000			100%	317.020.000
6.01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Kabupaten Tasikmalaya	10 Laporan	110.000.000	DAU		10 Laporan	121.000.000
6.01	02	2.02	0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Tasikmalaya	40 Laporan	178.200.000	DAU		40 Laporan	196.020.000
6.01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			CAKUPAN PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH		100%	1.699.500.000			100%	1.869.450.000
6.01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan		Cakupan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan		100%	448.800.000			100%	493.680.000
6.01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Kabupaten Tasikmalaya	5 Rekomendasi	302.500.000	DAU		5 Rekomendasi	332.750.000
6.01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	Kabupaten Tasikmalaya	4 Rekomendasi	146.300.000	DAU		4 Rekomendasi	160.930.000
6.01	03	2.02	Pendampingan dan Asistensi		Cakupan Pendampingan dan Asistensi		100%	1.250.700.000			100%	1.375.770.000
6.01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	59 Perangkat Daerah	338.700.000	DAU		59 Perangkat Daerah	372.570.000

6.01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kabupaten Tasikmalaya	59 Perangkat Daerah	409.500.000	DAU		59 Perangkat Daerah	450.450.000
6.01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kabupaten Tasikmalaya	6 Kegiatan	402.500.000	DAU		6 Kegiatan	442.750.000
6.01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kabupaten Tasikmalaya	59 Perangkat Daerah	100.000.000	DAU		59 Perangkat Daerah	110.000.000



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD di tahun 2025. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja serta harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra dan RPJMD pada tahun 2025.

Dalam hal ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka diperlukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Renstra dapat dicapai. Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana. Tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Karena itu, prosedur standar pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat. Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana akan memudahkan Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk *proving* (membuktikan) kinerja dan untuk *improving* (memperbaiki) kinerja.

Saat penjabaran Rencana Kerja ini ke dalam RKA, maka pada saat itu juga harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan. Penjabaran RKA yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan. Hal itu sangat diperlukan untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan capaian programnya.

Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Hasil evaluasi yang di dapatkan dari pelaksanaan Renja merupakan modal berharga untuk lebih mengarahkan pada

optimalisasi pencapaian target tahunan Renstra SKPD dan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya di Tahun 2025.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, sehingga Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat tersusun. Semoga keberhasilan Rencana Kerja ini dapat diwujudkan dengan adanya kesepahaman yang sama dalam mengimplementasikannya untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan bersama.

